



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI RI  
Gedung Nusantara I  
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H. (F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos./Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Laporan perkembangan kinerja sektor migas tahun 2022.  
2. Program prioritas tahun 2023.  
3. Perkembangan revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.  
4. Lain-lain.  
Hadir : 37 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. ANGGOTA DPR RI:**

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Dony Maryadi Oekon, S.T.
2. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
3. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
4. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Paramitha Widya Kusuma, S.E.

7. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
8. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

8 orang anggota dari 8 anggota:

1. Maman Abdurrahman, S.T.
2. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
3. Drs. H. Gandung Pardiman, M.M.
4. Drs. Mukhtarudin
5. Ir. Lamhot Sinaga
6. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. Bambang Haryadi, S.E.
2. Moreno Soeprapto
3. Dr. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

5 orang anggota dari 6 anggota:

1. Sugeng Suparwoto
2. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Arkanata Akram, S.T., BE(Hons), M.Eng.Sc.
5. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Marwan Ja'far

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartomo Hutomo
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H.
2. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
3. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
4. H. Nasril Bahar, S.E.
5. Fachry Pahlevi Konggoasa, S.E.

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Tutuka Ariadji (Dirjen Migas Kementerian ESDM RI)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI,

Hadir di sini Pak Bambang Haryadi dari pimpinan yang akan nanti bergabung bersama kami, Pak Maman dan Pak Ketua sedang bergabung melalui *zoom* nanti akan hadir fisik.

Yang kami hormati Bapak Dirjen Migas Kementerian ESDM beserta seluruh jajaran, serta  
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada hari ini kami setuju akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Kementerian ESDM RI dengan agenda:

1. Laporan perkembangan kinerja sektor migas tahun 2022,
2. Laporan program prioritas tahun 2023,
3. Perkembangan revisi Perpres 191 Tahun 2014, dan
4. Dan lain-lain.

Sesuai dengan laporan dari sekretariat, saat ini telah bergabung 14 anggota dari 7 fraksi yang ada sehingga kuorum sebagaimana dinyatakan telah penuh. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan Anggota agar rapat dengar pendapat ini dapat dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka apa dapat disetujui? Baik.

Atas persetujuan Anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahima* rapat dengar pendapat hari ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(RAPAT: TERBUKA)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebelum menyajikan rapat ini kami minta Ibu/Bapak Anggota bahwa rapat ini selesai pada paling lambat pukul 12.30 karena kita akan mengagendakan Rapat Paripurna sehingga rapat akan dihentikan atau kita skors jam 12.30 apa dapat disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Baik.

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Untuk menghemat waktu dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat hari ini kami langsung berikan kesempatan kepada Bapak Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menyampaikan pemaparan sesuai agenda pada hari ini, kami persilakan Pak Dirjen.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Makasih

Yang terhormat Pimpinan, dan  
Seluruh Anggota Komisi VII DPR RI,  
Yang saya hormati para pejabat Dirjen Migas, serta  
Hadirin yang berbahagia.

Selamat pagi,  
Salam sejahtera,  
*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan agenda:

1. Laporan perkembangan kinerja sektor migas tahun 2022,
2. Program prioritas tahun 2023, dan
3. Perkembangan revisi PP 191 Tahun 2012 tentang pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Sebagai salah satu upaya peningkatan produksi dan cadangan migas nasional pada Tahun 2022 ditawarkan wilayah kerja migas konvensional sebanyak 13 dari target 10 wilayah kerja dengan capaian kinerja sebesar **130%**. Pengumuman penawaran wilayah kerja migas konvensional dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I pada tanggal 20 Juli 2022 dan 20 September 2022 sebanyak 7 wilayah kerja. Tahap II, pada tanggal 8 November 2022 dan 23 November 2022 sebanyak 6 wilayah kerja.

Dari penawaran wilayah tahap I tahun 2022 tersebut sebanyak 7 WK didapatkan 4 WK pemenang, yaitu WK Belawan, WK (*Offshore North West Aceh*) ONWA, WK *Offshore South West Aceh* atau OSWA, dan WK *west Kampar*.

Terhadap WK yang tidak, tidak didapatkan pemenangnya maka ditetapkan sebagai WK *available* yang dapat diusulkan sebagai penawar langsung tanpa melalui studi bersama atau diusulkan untuk lelang kembali melalui studi bersama. Sedangkan penawaran wilayah kerja tahap ke II tahun 2012 sebanyak 6 WK kirimkan 2 pemenang lelang yaitu WK Jabung Tengah dan WK Paus sementara WK lainnya masih dalam proses lelang.

Pada tahun 2022 juga telah dilakukan penandatanganan 5 kontrak kerjasama yang terdiri dari 4 kontrak kerjasama hasil lelang tahun 2021 yaitu WK Bertak Pujur, Bertak Puyuh Pijar, WK Agung 1, WK Agung 2 dan WK *North Ketapang*, serta 1 kontrak kerjasama hasil lelang tahun 2022 yaitu WK Bawean.

Keberhasilan penawaran wilayah kerja ini tidak terlepas dari upaya-upaya kami untuk meningkatkan minat terhadap dinamika yang ditawarkan. Dirjen Migas terus berupaya melakukan perbaikan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok atau *terms and condition* kontrak kerja sama agar lebih menarik antara lain melalui pemberian insentif-insentif dan partisipatif *interest* atau PI 10% yang merupakan implementasi dari keputusan ESDM Nomor 199 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian insentif kegiatan usaha Migas Keputusan Menteri ESDM Nomor 223 Tahun 2022 tentang pelaksanaan ketentuan peranan PI 10% kepada BUMD di WK Migas dan implementasi keputusan Dirjen Migas Nomor 153 Tahun 2022 tentang SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Evaluasi Penilaian PI 10% pada WK Migas.

Selanjutnya, sementara itu realisasi investasi tahun 2022 adalah sebesar 13,9 miliar USD US dollar dari target 17,01 miliar US dolar atau capaian 81,72% dari target. Terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian investasi migas diantaranya perubahan insentif dan fiskal komunikasi serta perubahan pelaksanaan investasi hilir migas seperti kilang RDMP dan GRR serta proyek pembangunan pipa gas.

*Lifting* migas yang merupakan komponen dalam perhitungan besaran penerimaan negara realisasinya pada tahun 2022 mencapai 612 ribu barel per *day* untuk minyak atau 87% dari target 703.000 barel *oil per day* dan 955 ribu barel *oil equivalent per day* untuk gas bumi atau 92,18% dari target 1.036 ribu barel *oil equivalent per day* dengan ICP rata-rata sebesar 97,03 USD per barel terdapat deviasi 3% dari target ICP 100 USD per barel.

Tidak tercapainya target capaian migas tersebut antara lain karena rendahnya posisi awal atau *low entry point* pada tahun 2022 sampai *shutdown* dan *delay on stream* pada beberapa proyek. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan upaya peningkatan dan pencapaian *lifting* gas yang telah dan akan terus dilakukan diantaranya optimasi fungsi pada lapangan *existing*, transformasi *resources production*, mempercepat NH *for recovery*, eksplorasi secara massif untuk penemuan besar dan kemudahan investasi dan insentif, pada akhir-akhir ini telah menunjukkan produksi dari sebelumnya.

Penerimaan negara terutama PNBP SDA Migas tahun 2022 telah mencapai Rp148,7 triliun dan telah melampaui target dengan capaian 106,90%. Peningkatan PNBP SDA ini disebabkan adanya kenaikan nilai ICP rata-rata tahun 2022 hingga mencapai 97,03 USD per barel yang merupakan dampak kenaikan harga minyak dunia yang disebabkan salah satunya oleh karena perang Rusia - Ukraina.

Dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2022 balai besar pengujian migas, Lemigas resmi bergabung dengan Dirjen Migas. Lemigas sebagai unit baru yang juga menghasilkan PNBP pada tahun 2022 berhasil mencapai Rp188 miliar dari target Rp155 miliar atau mencapai 121,29% dari target.

Kemudian pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri tahun 2022 mencapai 68% berada di atas target yang telah ditetapkan, yaitu 66% dengan capaian kerjanya sebesar 103, 103%.

Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri akan terus ditingkatkan dengan memastikan kesiapan sektor pengguna gas dalam negeri melalui berbagai kebijakan demi mendukung tumbuh kembangnya industri dalam negeri.

Selanjutnya, pemerintah terus berupaya untuk menyediakan akses energi bagi masyarakat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur migas. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan jargas sejumlah 40.877 sambungan rumah yang tersebar di 12 kabupaten/kota dari target 40.777 sambungan rumah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi nasional telah dilaksanakan pembagian paket *convertkit* nelayan sebanyak 30 ribu paket yang tersebar di 17 provinsi dan pembagian paket konkit petani sebanyak 30 ribu paket yang tersebar di 16 provinsi. Selain itu, telah dibangun juga pipa gas Semarang – Batam tahap 1 dengan relaksasi telah mencapai 76,14% dari target sebesar 75,88%.

Dalam rangka peningkatan kesadaran migas, Dirjen Migas telah merumuskan sebanyak 6 SKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan 10 RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia). Selain itu juga telah dilakukan pengawasan objek vital nasional sebanyak 218 objek pada kegiatan usaha hulu dan 98 objek pada kegiatan usaha hilir migas.

Adapun realisasi anggaran di jamika sehingga akhir Desember tahun 2022 telah mencapai 96,30%, sebagian besar anggaran Dirjen Migas digunakan untuk pembangunan fasilitas migas dan pemulihan ekonomi nasional yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirjen Migas terus berkomitmen agar penggunaan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Realisasi anggaran Dirjen Migas pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 96,32% atau 1.901,14 miliar dari pagu Dirjen Migas pada tahun anggaran 2022 sebesar 1.923,76 miliar dengan komposisi serapan anggaran sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar 92,18% atau Rp73,74 miliar dari Pagu Anggaran sebesar Rp79,99 miliar.
2. Belanja barang sebesar 98,17% atau Rp766,25 miliar dari Pagu Anggaran sebesar Rp780,52 miliar;
3. Belanja modal sebesar 95,32% atau Rp1 triliun 61,14 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp1 triliun 113,24 miliar.

Data realisasi di atas merupakan gabungan dari satker Dirjen Migas dan Balai Besar MGP Migas, dimana PP PNGP, PNGP Migas baru bergabung pada Eselon I Dirjen Migas per 1 Oktober 2022.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan serapan anggaran perbulan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 di mana besaran serapan anggaran meningkat pada TW IV setiap tahunnya seiring dengan akhir dari kegiatan pembangunan infrastruktur migas, serta pengawasan dan koordinasi kegiatannya di lapangan melalui SP2D.

Selanjutnya,

Sedangkan realisasi serapan anggaran 2022 per unit Eselon II pada Dirjen Migas dengan gabungan sumber anggaran dari sumber rupiah murni, PNBP Migas dan PNBP Minerba adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Program Migas sebesar 97,39% atau 16,12 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp16,56 miliar.
2. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas sebesar 93,11% atau Rp15,2 miliar dari pagu anggaran sebesar 16,33 miliar.
3. Direktorat Pembinaan Hulu Migas sebesar 91,71% atau Rp19,24 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp20,97 miliar.
4. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas sebesar 96,5% atau 1.624,59 miliar dari pagu anggaran sebesar 182,89 miliar.
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan sebesar 98,5% atau Rp11,04 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp11,21 miliar.
6. Sekretariat Direktorat Jenderal Migas sebesar 93,16% atau Rp129,73 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp139,25 miliar.
7. Direktorat Migas 98,5% atau 85,3 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp86,52 miliar.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Target *lifting* migas tahun 2023 dipatok sebesar 660.000 barel oil *per day* untuk minyak bumi dan seribu serratus ribu atau 1 juta 100 ribu barel *oil equivalent per day* untuk ICP rata-rata sebesar 90 USD per barel sesuai dengan penetapan asumsi dasar makro APBN tahun 2023.

Pada tahun 2023 ini dengan melihat kegiatan usaha migas dapat berangsur-angsur membaik sehingga kami mentargetkan investasi migas tahun 2023 sebesar 17,4 miliar US dolar.

Selanjutnya, target penawaran atau lelang wilayah kerja migas adalah sejumlah 10 WK pada tahun 2023 ini. Penerapan kebijakan melalui pemberian insentif dan PI 10% akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan minat investor terhadap WK. Penawaran wilayah kerja tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan mengangkat membangkitkan kembali gairah kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

Sementara itu target pemanfaatan gas untuk domestik pada tahun 2023 ditingkatkan ke angka 67%. Kami akan terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut melalui kerjasama yang lebih erat dengan para *stakeholder*.

Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kebutuhan terhadap migas, maka pada tahun 2023 target penyaluran minyak tanah di patok sebesar 0,5 juta kiloliter, solar 17 juta kiloliter dan LPG sebesar 8 juta matrix ton. Sementara target penerimaan negara terutama PNBPN SDA Migas tahun 2023 ditetapkan Rp131,2 triliun dengan perkiraan nilai ICP sebesar 90 USD per barel. Sementara target PNBPN BLU Balai Besar pengujian minyak dan gas bumi Lemigas pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 150 miliar.

Pembangunan infrastruktur migas juga masih akan terus dilaksanakan, rencana pembangunan jargas di tahun 2023 akan dilaksanakan melalui skema non APBN, sementara kegiatan pendistribusian konkit nelayan akan ditarik sebesar 20 ribu paket di 13 provinsi dan konkit petani sebanyak 30 ribu paket di 13 provinsi. Kemudian pembangunan pipa transmisi ruas Semarang – Batang tahap 1 masih dilanjutkan dan seiring dengan itu dibangunnya ruas Cirebon – Semarang tahap 2. Diperkirakan tahap satunya akan selesai pada Bulan Juli atau Agustus tahun ini.

Ditjen Migas sebagai salah satu Eselon I yang memiliki layanan perizinan akan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima melalui optimalisasi penyelesaian perizinan migas dengan target SNA 8 hari untuk setiap perizinan hulu dan perizinan hilir migas.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat,

Selanjutnya kegiatan prioritas Ditjen Migas yang mendukung prioritas nasional pada RKP 2023 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. *Converter kit* nelayan PN 5 dengan alokasi pagu sebesar 208,18 miliar, lokasi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
2. *Converter kit* petani PN 5 dengan alokasi pagu sebesar 259,53 miliar, lokasi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
3. Transmisi pipa gas Cisem, Cirebon – Semarang PN 5 PSN dengan alokasi pagu sebesar Rp615,46 miliar, alokasi anggaran tahap 1 akan dilaksanakan Semarang – Batang.

4. Wilayah kerja PN 1 dengan alokasi pagu sebesar 3,3 triliun 390 miliar eh maaf 3-3 miliar koma 39, 3,39 miliar untuk 10 WK Migas eks terminasi dengan subsidi bersama; selanjutnya
5. LPG 3 kilo gram PN 3 dengan alokasi pagu sebesar 3 miliar 9, 3 miliar 90 juta, lokasi tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan dan Sulawesi; selanjutnya
6. Fasilitas kilang PN5MP dan PSN dengan alokasi pagu sebesar 0,347 miliar; selanjutnya
7. RUU Migas PN 1 dengan alokasi pagu sebesar 0,55 miliar akan dibahas dengan DPR.

Selanjutnya terkait program konversi BBM dan BBG untuk layanan sasaran tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 20 ribu paket di 14 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya,

Sedangkan program konversi BBM ke BBG untuk petani sasaran tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 30.000 paket di 14 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Terkait perkembangan revisi Perpres 191 tahun 2012 izinkan kami menyampaikan urgensi terkait percepatan penerbitan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan, diperlukan pengaturan BBM JBT dan JPKP tepat sasaran.

- a. Belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JPKP.
  - b. Pengaturan untuk konsumen pengguna JPT yang berlaku saat ini masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir.
2. Mengacu pada APBN tahun 2023 kuota JPT solar ditetapkan sebesar 17 juta kiloliter dan kuota minyak tanah ditetapkan sebesar setengah juta kiloliter di mana kuota tersebut di bawah proyeksi konsumsi JPT tahun 2023.

Tren konsumsi JPKP tahun 2020-2022 telah ditetapkan kuota JPKP tahun 2023 sebesar 32,56 juta kiloliter, tumbuh atau tumbuh 10,38%. Manfaat, jika tidak dilakukan revisi Perpres 191 Tahun 2015 berpotensi terjadinya *over* kuota JPT solar dan JPKP pertalite, sehingga diperlukan pengaturan konsumen pengguna melalui revisi PP 191 tahun 2014 agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Selanjutnya,

Adapun perkembangan pembahasan perubahan keempat Perpres 191 Tahun 2015 dapat dilihat pada bagan berikut ini. Pertama, pada tanggal 29 Juni 2022 disampaikan permohonan persetujuan izin prakarsa kepada Kementerian BUMN.

Pada tanggal 20 dan 25 Juli, serta 1 Agustus 2022 dilaksanakan rapat panitia antar Kementerian PAK, di mana pada rapat PAK tanggal 1 Agustus 2022 Kementerian BUMN menyatakan akan mengembalikan izin prakarsa. Pada tanggal 12 Desember 2022 Kementerian BUMN mengajukan permohonan tidak melanjutkan izin prakarsa kepada Mensesneg. Pada tanggal 26 Desember 2022 terbit surat Mensesneg kepada Menteri ESDM meminta hasil kajian kompetensi terkait RPP 191 tahun 2015 untuk dilaporkan kepada Presiden RI. Pada tanggal 10 Januari 2023 telah disampaikan permohonan izin prakarsa termasuk kajian oleh Menteri ESDM kepada Presiden RI. Pada tanggal 31 Januari 2023 telah dilakukan rapat klarifikasi oleh Kemensesneg atas permohonan izin prakarsa di mana Kemensesneg masih akan meminta arahan pimpinan atas keberlanjutan pemberian izin prakarsa kepada Kementerian ESDM. Sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, hari ini, belum ada izin prakarsa kepada Kementerian ESDM.

Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

*Summary* perubahan rincian konsumen pengguna JBT dan JBKP dalam revisi lampiran Perpres 191 tahun 2015 dapat dilihat pada matriks berikut ini, di mana matriks sebelah kiri menginformasikan sektor pengguna yang tercantum dalam lampiran Perpres 191 Tahun 2015 untuk JBT produsen meliputi, atau minyak tanah meliputi rumah tangga, usaha mikro dan usaha perikanan. Minyak solar meliputi usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Adapun usulan perubahan pada lampiran Perpres 191 tahun 2015 dapat dilihat pada matriks sebelah kanan, di mana untuk sektor pengguna pada JBT produsen meliputi rumah tangga, usaha mikro, perikanan. Untuk sektor penggunaan JBT minyak solar meliputi industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi perkeretaapian dan pelayanan umum.

Selain JBT kerosin dan minyak solar pada usulan perubahan lampiran Perpres 191 tahun 2015 tersebut terdapat tambahan komoditas yaitu JBKP atau bensin, gaselin, RON 90, di mana sektor konsumen penggunaannya meliputi industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan, arahan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Terima kasih atas perhatiannya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Pak Dirjen atas pemaparannya.

Langsung saja kita buka untuk sesi diskusi pendalaman dari rekan-rekan Komisi VII yang hadir dalam kesempatan rapat dengar pendapat hari, kita awali dengan teman-teman anggota yang hadir langsung di ruangan dan kita akan mulai dari fraksi yang hadir di sini Partai Golkar kami persilakan kalau memang ada pertanyaan. Oke, lanjut Fraksi Partai Gerindra, Pak Dr. Ramson?

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Makasih, Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota Dewan terhormat,  
Pak Dirjen dan Direktur, Pak Direktur, Ibu Direktur dan semua jajaran yang saya hormati.

Terima kasih pemaparannya, sudah cukup lengkap mengenai kinerja sektor migas tahun anggaran 2022 program prioritas tahun anggaran 2023. Saya melihat bahwa, pendistribusian harga jual eceran bahan bakar minyak atau BBM itu ini maksudnya yang satu harga untuk seluruh Indonesia ya Pak Dirjen ya? Interaktif dikit ya Pak Ketua.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Kalau yang satu harga itu jumlahnya masih sekitar 500-an Pak, 504 dan nanti pastinya saya, 562 dan pastinya sekitar 500-an, Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Itu yang membuat kebijakan dari Dirjen Migas atau Kementerian ESDM ya Pak ya?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Jadi pada prinsipnya dengan BPH Migas, Pak Ramson. Jadi di evaluasi bersama BPH Migas, nanti yang menentukan itu BPH Migas, jadi kita memberikan masukan. Masukannya dari kami, nanti koordinasikan dengan BPH Migas kemudian ditentukan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Jadi usulan dari bawah?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Usulan dari bawah.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Dirjen, karena itu sangat penting terus di jaga agar saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil yang mungkin sebenarnya pendapatannya juga tidak lebih tinggi dari yang di daerah-daerah yang lebih produktif tetapi kalau harganya, harga BBM-nya lebih tinggi kurang adil.

Biar pun dari sisi *cost*-nya dari *cost* transportasi memang lebih tinggi, memang inilah yang menjadi beban negara bagaimana mengkombinasikannya. Jadi ada *cross* subsidi, subsidi dalam transportasinya, *cost* transportasi, *nah* itu kita mengharapkan itu agar bisa tetap dijaga dipelihara tetap berjalan Pak Dirjen agar di daerah-daerah tersebut tidak ada peningkatan harga tanpa diawasi oleh Dirjen Migas atau BPH Migas.

Terus yang kedua mengenai *converter kit* BBM ke BBG saya sangat apresiasi program yang untuk nelayan dan khususnya apalagi petani. Pak Dirjen, di daerah saya kebetulan daerah pemilihan saya untuk nelayan sudah berkurang karena kapasitas yang lebih besar tidak memenuhi prasyarat yang ditentukan oleh Dirjen Migas atau Kementerian ESDM, karena yang IUPK-nya sudah yang besar-besar.

Sebenarnya mereka tetap nelayan UMKM, tapi kapalnya sudah kapasitas yang lebih besar jadi sehingga sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Ditjen Migas atau Kementerian ESDM hanya sedikit yang memenuhi syarat di daerah pemilihan saya, khususnya Kabupaten Pematang Jaya, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan sama Kabupaten Batang.

Untuk *converter kit* petani sama untuk yang pompa atau disebut biasanya Alkon ya, Alkon, itu Ditjen Migas juga ya yang pompa untuk petani, ini *kan* sama dengan *converter kit* ke petani itu ya.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Merk-nya bukan Alkon Pak, iya betul tapi Yamaha bukan Alkon tadi.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Jadi pompa itu merk apa itu? Pompa petani dari Dirjen Migas juga *kan*? Saya *nggak* tau merk apa, itu memang sangat diperlukan oleh petani, cuman ini Pak Dirjen, di anggarannya itu tidak ada anggaran waktu proses penyerahan, jadi hanya dikirim pompa dengan *converter kit*-nya artinya lengkap dengan pipanya terus terang itu sangat membantu petani, cuman masalahnya *kan* petani ini tersebar.

Waktu pendataan relawan-relawan melakukan pendataan, tetapi waktu penyerahan dari sisi kapasitas staf atau tenaga dari Kementerian ESDM,

Pertamina juga di *backup* oleh relawan dan juga oleh Pemda, staf Pemda, itu memang kapasitasnya hanya 50-60 orang per hari.

Dulu saya pikir seperti nelayan, *kan* nelayan rata-rata hanya dapat 100 itu 2 hari selesai, kalau ini *kan* banyak petani itu bisa 15 hari di Kabupaten Pekalongan 10 hari contohnya, itu memerlukan *cost*, memerlukan biaya untuk yang menyeleksi itu harus perlu makan, ada *transport*. Jadi kalau 15 orang yang bekerja di situ atau 20 orang bisa kali 10 bisa kali 15 hari.

Kemarin itu tidak ada, barusan dilaporkan bahwa saya *kan* hanya hadir waktu pertamanya sama Pak Direktur juga, Pak Laode waktu di Kabupaten Pekalongan, kebetulan waktu di Kabupaten Pemalang saya kebetulan tiba-tiba ada tugas ke Eropa jadi oleh staf saya.

Baru saya tau bahwa, rupanya proses penyerahan itu bisa sampai 15 hari. Ini maaf Pak Ketua ya interaktif ya, sehingga untuk 2023 sesudah saya tau saya buat surat ke dapil saya bahwa untuk 2023 sesudah terdata dan sesudah di *approve* oleh Dirjen Migas petani-petani yang akan memperoleh tau jumlahnya berapa di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, nanti sesudah jelas jumlahnya berapa dibuat oleh tiap Kabupaten itu membuat agar biaya penyerahan itu saya yang tanggung.

Jadi misalnya kalau yang banyak kalau sampai 1.000 bisa 15 hari saya dengar, saya bilang saya sampaikan di surat resmi agar di buat anggaran seefisien mungkin, jadi misalnya biaya makan, biaya *transport* yang mengerjakan itu sehingga proses penyerahan ke petani berjalan lancar, tetapi petani dari tempat penyerahan itu, dari balai itu ke desa masing-masing yaitu tanggung jawab petani.

Jadi ini yang saya juga baru tau kalau tidak ada anggarannya Pak Dirjen. Memang agak ini juga sedikit *problem* juga, makanya akhirnya saya buat surat resmi ke 3 kabupaten itu. Artinya, biarlah dari dana saya tapi saya minta dibuat anggarannya yang resmi seefisien mungkin, kalau sudah jelas misalnya setiap kabupaten di dapil saya itu dapat jatah berapa.

Jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa, program itu sangat efektif untuk petani. Memang syaratnya cukup berat, syarat-syaratnya cukup berat. Jadi proses seleksinya rupanya sehari bisa hanya 50 petani aja yang-waktu proses penyerahan, jadi itu sebabnya memerlukan waktu yang lama. Jadi mungkin kalau ESDM membuat anggaran lagi lebih repot lagi, mungkin tahun nantilah karena ini *kan* udah kita tentukan anggaran 2023 ini mau saya sampaikan, apalagi ini *kan* untuk petani Pak Dirjen.

Saya kalau sama kaum marhaen itu petani nelayan saya *concern*, biarlah saya ngurangin apa namanya servis-servis di luar, saya-saya, ya tapi saya distribusikan dana saya sebagian ke sana. Iya saya tetap marhaenis saya bukan marhaen, beda marhaenis dengan marhaen Pak Dirjen, kalau marhaen itu yang diperjuangkan seperti petani, nelayan, marhaenis yang memperjuangkan. Jadi saya marhaenis *gitu* bukan marhaen, jadi itu berbeda. Jadi iya jadi-jadi kalo soal itu saya *concern*, jadi saya menikmati jadi wakil rakyat Pak Dirjen, ya *insya* Allah nanti nyambung lagi, saya nyambung lagi.

Jadi itu pemilu mundur, ya kita pemilu mundur 2027, itu Pak Dirjen soal yang tadi. Ini saya senang lihat membuat programnya ini program di daerah, jadi memang betul-betul Pak Dirjen ini profesor. Jangan disebut ini untuk DPR ini yang bahaya, mungkin udah tau lah analoginya kemana maksud saya *kan*. Memang itu untuk daerah, cuman kita *kan* menggerakkan memperjuangkan kepentingan rakyat tapi kalau di anggarannya disebut ini *kan nggak* bener, itu *hundred percent* untuk rakyat, 100% untuk rakyat.

Malah kita biarpun apa kita malah keluar dana juga untuk itu, apalagi kalau stafnya Pak Dirjen Migas baik-baik di lapangan itu kadang-kadang kalau saya-saya dulu kemarin *nggak* kalau sebelumnya habis dari penyerahan di nelayan saya ajak makan yang enak-enak di daerah pemilihan saya, saya bilang apa aja maunya, untung dia *nggak* mau cari-cari yang macam-macam itu.

Jadi bukan soal itu, karena untuk rakyat *kan* untuk rakyat iya. Jadi itu aja Pak Dirjen, kalau soal di sini saya lihat soal *lifting* minyak sama *lifting* gas. Kemarin kita rapat mengundang mitra soal RUU Migas memang saya berpikir bahwa, kita untuk transisi energi perlu percepatan untuk peningkatan eksplorasi gas, jadi nanti mudah-mudahan kami Komisi VII bersama pemerintah dalam proses pembuatan RUU Migas itu lebih efektif membuat ruang agar investor-investor lebih-lebih tertarik untuk mengembangkan investasi di sektor gas juga di sektor minyak. Memang banyak poin-poin yang harus dibahas untuk itu, karena sekarang seperti ini *lifting* minyak kita sudah 612 barel per hari jadi sudah sangat rendah.

Waktu memproses Undang-Undang tahun 2001 itu masih 1,2 juta barel, Pak Dirjen. Jadi sesudah jadi Undang-Undang tahun, nomor 22 tahun 2001 menurun ini 50%, sekarang hanya 612.000 barel per hari. Saya pikir sementara itu aja.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Rico, itu barusan ada permintaan dari Pak Bambang untuk bisa menyampaikan apa namanya pandangannya, boleh tunggu sebentar Pak Rico ya. Pak Bambang silakan Pak Bambang, keliatannya Pak Rico sama Pak Bambang harus berganti kemeja untuk mempresentasikan warna masing-masing, ini salah-salah warna nih masing-masing.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Baik, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII,  
Yang Pak Dirjen Migas beserta jajarannya.

Mungkin betul juga kata Pak ini terinspirasi oleh beliau, karena saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya sambungkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramson, Bung ya, beliau menolak dipanggil Pak, dipanggil Bung.

Begitu Pak Dirjen, pertama harapannya adalah bahwa program yang bermanfaat dengan masyarakat ini betul-betul dapat dilaksanakan, Pak. Jadi saya sendiri merasakan tahun kemarin, tahun 2022, ketika kita menyerahkan bantuan konkrit baik itu nelayan maupun untuk petani itu betul-betul dirasakan apa namanya bagaimana masyarakat itu senang, kemudian juga merasa bermanfaat, dan kemudian tentunya ini tepat guna.

*Nah* di tahun 2023 Pak harapannya adalah jangan nanti ini kemudian menjadi hanya apa ya gula-gula Pak karena nanti kena yang namanya *automatic adjustment*. *Nah* izin, apa namanya interaktif, saya ingin bertanya ke Pak Dirjen apakah program ini oleh Dirjen Migas dimasukkan di dalam *automatic adjustment* Pak, silakan Pak?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Jadi kami itu kalau dalam menyusun anggaran selalu tidak sendiri Pak, selalu dengan sekjen, jadi di-dibarengkan dengan Kementerian ESDM. Untuk yang ini, itu konkrit ini, ada ya, ada 160 miliar, *automatic adjustment*.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Pak Ramson, Pak Ramson, ini kena *automatic adjustment* Pak 160 miliar.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Jadi kita masih, masih kita tetap **memprioritaskan** ini Pak tapi memang kewenangan tidak di kami saja.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

*Nah* jadi saran kami Pak dan juga merupakan harapan masyarakat yang ada di berbagai penjuru Indonesia yang mungkin mendapat apa namanya alokasi tentu berharap ini tahun 2023 ini betul-betul dapat kembali direalisasikan, Pak. *Nah* ini penyampaian aspirasi yang saya pikir cukup penting, karena kemarin itu Pak luar biasa Pak jadi masyarakat itu merasa senang Pak, kita pun sebagai pihak yang membantu menyalurkan itu juga turut bahagia Pak, karena kita merasakan apa yang kita kerjakan itu bermanfaat juga mitra kita Kementerian ESDM khususnya Dirjen Migas juga betul-betul bisa menunjukkan kontribusinya kepada masyarakat seperti itu, itu satu harapan yang saya pikir perlu diperhatikan.

Kemudian yang kedua saya ingin tanya begini Pak, saya juga mendapat semacam apa ya bahan-bahan masukan dari berdiskusi dengan beberapa pengguna bahan B solar B20 ya, ini *kan* tadi target kita mau ditingkatkan.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

35 dulu baru.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Sudah mulai sejak kapan, Pak?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

35, Februari.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Februari. Dari Pertamina apakah sudah jalan atau belum ya?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Sedang-sedang, karena peralatannya itu *kan* Pertamina *kan* berarti *kan* ini Pak pipanya itu untuk aliran yang *faming nya* lebih besar daripada, dia aliran lebih besar jadi saya mau kasih, apakah pipa yang sekarang masih bisa tetap dipakai atau tidak, jadi kita cek bisa, bisa dipakai.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Jadi begini Pak, ketika B20 pun seperti united tractor itu melaporkan kepada kami mereka harus apa namanya memikirkan ada semacam tambahan di dalam aplikasi menggunakan B20 tersebut. Kalau tidak alat-alat berat mereka itu akan mengalami permasalahan, misalkan keraknya lebih banyak, kemudian apa dan ini mempengaruhi daripada pemeliharaan dan kualitas daripada umur mesin.

*Nah* ini yang kami *warning* Pak, jangan sampai ketika B35 ya *kan*, ini *kan* dipergunakan masyarakat lebih luas Pak, ketika *treatment* begitu-begitu saja tanpa memperhatikan persoalan kualitas daripada bahan bakar terhadap mesin dan sebagainya, ini malah jangan-jangan kalau tidak matang perencanaannya ini bisa berakibat kepada kerusakan yang masif Pak kepada alat-alat mesin baik itu mobil maupun truk pada sektor industrinya juga pada alat berat *kan* seperti itu. Karena tentu formulanya sama *kan* Pak baik itu yang PSO maupun industri sama saja *kan* itu, *nah gitu*. Itu apakah dari justifikasi dari Dirjen Migas atau dari BPH atau SKK atau dari mana?

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Jadi sudah dites Pak dites tidak hanya statik juga jalan juga di Lemigas Pak, ini sudah dites untuk mobil dan truk ya. Jadi tidak hanya, tidak hanya tes

di lab saja, tapi di pakai jalan sekian ribu kilometer, ini tidak, tidak jadi masalah maka kita.

**F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):**

Oke saya pikir begitu Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Bambang Patijaya.

Lanjut Pak Rico Sia.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya baik yang hadir secara fisik *virtual*.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Terima kasih untuk paparannya Pak Dirjen, komprehensif menurut saya juga tadi sudah dikatakan cukup lengkap oleh Pak Ramson. Langsung ke permasalahan, seingat saya waktu zamannya Pak Sesmen Pak Ego Syahrial, *converter kit* ini baik yang nelayan maupun yang petani seingat saya ada 40.000 ya waktu itu diperuntukkan untuk Papua dan Papua Barat, itu dulu NTT juga.

Lalu seiring berjalannya waktu dia bergeser nih *nggak* ada di Papua, yang pertama karena alasannya tidak ada apa namanya di sana gas waktu itu, alasannya itu. Lalu rencananya waktu itu digantikan untuk ini terkait dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu diminta, saya waktu itu minta digantikan, karena dapil saya Papua Barat. Mewakili Ibu Ina Kobak dan teman-teman yang ada di Papua juga pada saat itu kita minta untuk digantikan.

Hari ini saya apresiasi yang tahun 2022-nya, 2023-nya nih Pak lagi pengen tanya nih Pak di halaman 11 dan 12, mungkin Pak Laode bisa lihat lagi bahwa di sini di Papua ini kosong nih, Papua dan Papua Barat. Apa keadilan yang kita berikan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat, kira-kira apa keadilan buat mereka. Saya tidak bisa membuat kebijakan yang ada kebijakan di sana, saya hanya bisa memperjuangkan.

*Nah* saya mau, saya mohon kalau bisa kalau masih ada kesempatan tadi *kan ada automatic adjustment* dan lain sebagainya, tolong Papua dan Papua Barat ini diperjuangkan supaya tidak ribut-ribut terus. Yang ribut tentunya masyarakat di sana, saya menyampaikan dan memperjuangkan.

Ada satu program yang sekarang sementara dikerjakan juga di sana terkait dengan tadi LPG 3 kilo yang tidak pernah masuk di sana padahal sudah direncanakan terus-terus. *Nah* terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ramson rekan saya dari Gerindra, apakah Papua juga bisa segera kalau bisa, *kan* di sana sudah ada PGN ya, kalau memang itu lebih murah jargasnya kasihlah kesempatan juga kepada masyarakat yang sekarang ini mungkin bantuan gratis dengan sambungan-sambungan itu ke rumah-rumah tentunya, di PGN sana, di Kabupaten Sorong adanya.

*Nah* kalau memang itu sudah berjalan, sekali lagi Pak kalau boleh tolong bantulah Pak dengan mereka dengan yang namanya sambungan langsung ke rumah-rumah, ya kalau perlu gratis karena yang dapat *converter kit* pun juga gratis, yang tadinya diperuntukkan untuk Papua, Papua Barat dan NTT tapi sampai sekarang kan malah digeser ke wilayah lain, *nah* ini untuk keadilan Provinsi Papua dan Papua Barat, mungkin daerah-daerah tertinggal lainnya juga yang belum.

Mungkin perbanyak juga tadi saya sepakat bahwa mungkin Dirjen Migas kita harus betul-betul kerjasama dengan Pertamina terkait dengan konversi tadi dari BBM ke gas mengingat tadi kita sudah mulai beralih transisi dari energi tadi fosil ke energi apa baru terbarukan. Jadi mudah-mudahan yang motor-motor juga karena *nggak* ada tempat pengisiannya karena mereka juga bisa melakukan sendiri konversi baik yang mereka merasa aman maupun ada yang merasa tidak aman kalau bikin sendiri tapi bisa mengisi begitu, apalagi di Papua, Papua Barat tentunya motor-motor yang dipakai juga cukup banyak, tidak hanya di daerah misalnya di Jawa dan sekitarnya. Mungkin itu saja sementara, Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Shalom,  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.*

#### **F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, interupsi sedikit.

Ini soal *automatic adjustment* itu benar *nggak*, saya bisa tanya *nggak*? Pak Dirjen bener *nggak* bahwa *converter kit* petani masuk dibintang *gitu*, jadi belum pasti yang 30.000 paket ini?

#### **DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Tidak semuanya Pak, tidak semuanya, jadi tadi 160 ya *kan*, totalnya itu 200 plus 250 miliar totalnya, 160 yang dibintang tadi atau, tapi kita masih berusaha Pak jadi belum *final*, cuma kita *nggak*, *nggak* menerima itu, jadi kita masih.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Jadi yang jamin untuk *converter kit* petani berapa anggarannya, yang tidak masuk ke *automatic adjustment*.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Petani berapa petani 22.800, terus nelayan 10.000, Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Kalau yang 22.800 tidak dibintangi ya? Masih adalah.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Tidak dibintangi, masih ada 22.800, 10.000 ya tapi kami masih lebih murah... (*Suara tidak jelas 53.20*) berusaha.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Iya, tapi saya ketar ketir soalnya disampaikan beliau.

Makasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Ramson. Lanjut Pak Marwan Jafar dari saksi PKB, silakan Pak.

**F-PKB (H. MARWAN JAFAR):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati,  
Tamu kita Pak Dirjen Migas dan seluruh jajaran yang kami muliakan.

Saya ringan-ringan aja Pak, tadi Pak Ramson menyebut *automatic adjustment* dan ini memang harus kita perjuangkan semaksimal mungkin Pak, supaya target itu tercapai, dan kalau bisa kita yang di Banggar bisa melakukan lobi dengan Kementerian Keuangan atau barangkali juga kementerian juga bisa lobi dengan Kementerian Keuangan supaya ini tidak dibintangi kira-kira itu, karena ini menyangkut seluruh hajat dan kepentingan rakyat kita yang memang membutuhkan, itu yang pertama Pak.

Yang saya mau menggaris kembali apa yang disampaikan Pak Ramson dan Pak Bambang kira-kira itu, dan ini sangat mudah Pak sebetulnya kalau *approach* kita terhadap Kementerian Keuangan itu lancar, saya kira tidak ada persoalan.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada hambatan dan sekaligus masalah dalam konteks investasi migas. *Nah* ini yang kita capai sekarang ini adalah 13, 13,90 miliar dolar padahal target kita adalah 17,01 miliar dolar pada tahun 2022, ini soal investasi migas Pak. Itu artinya bahwa, dari sisi *marketing* kita itu memang harus berjalan dengan efektif dan apa namanya memperlebar sayap di berbagai sektor termasuk swasta dan pihak-pihak luar negeri dan apa namanya dalam tatanan global saya kira ini menjadi penting untuk kita perhatikan terutama hambatan tentang investasi di bidang migas ini dan itu saya kira Pak Dirjen dan teman-teman jajarannya sudah tau ini tetapi masih di genjot Pak supaya sampai ke 17.000 US dolar.

Ya ini lagi-lagi soal ilmu *marketing* Pak yang harus kita kedepankan dalam konteks ini bahwa Indonesia punya potensi A, B, C, D, dan ini layak untuk dijadikan apa namanya dan aman untuk dijadikan investasi dari pihak luar terutama adalah stabilitas politik, lalu soal kriminal, dan lain-lain, dipastikan bahwa itu adalah aman semua, itu yang kedua Pak.

Kemudian yang ketiga adalah hal yang tidak kalah penting dari disebut-sebut oleh Pak Ramson tentang *lifting*. *Lifting* kita ini minyak dan gas bumi tahun 2022 itu tidak mencapai target Pak, *nah* sekali lagi ini masalah klasik dari periode ke periode, dari bulan ke bulan selalu bicara masalah *lifting* minyak dan gas bumi ini, dan ini juga kita apa namanya harus mencari semacam *breakthrough* tadi Pak Rico sudah menyampaikan ya EBT itu satunya untuk menambal dari kekurangan *lifting* itu dan ini menjadi salah satu hal yang penting harus kita perjuangkan.

Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah target kita pada tahun 2013 itu berkuat di angka 17 miliar US dolar ini belum signifikan untuk memenuhi target itu dan angkanya masih berputar-putar di situ dan lalu belum tercapai. Ini juga salah satu menjadi PR kita dalam kerangka yang lebih, lebih besar lagi dan mendamaikan dan untuk menaikkan *leverage* pada level yang lebih tinggi dan ini saya kira tentang apa namanya soal *lifting* soal apa investasi migas yang masih berputar di angka 17 dolar ini, miliar dolar ini saya kira masih kesempatannya masih banyak Pak, terutama kita bisa memetakan potensi-potensi apa, migas kita di seluruh Indonesia dan dengan negosiasi yang tentunya seimbang, *apple to apple* jadi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah bahwa sebetulnya saya ingin tahu Pak kalangan mana yang dibidik oleh ESDM dalam hal ini adalah Dirjen Migas untuk mencapai investasi migas pada tahun 2023 ini, kalangan mana saja. Saya kepingin tau supaya ini juga memperluas, di samping memperluas wawasan juga untuk mengetahui oh pihak misalnya Shell atau BB atau Petronas atau apapun bisa kita jadikan semacam rujukan bagaimana investasi di bidang ini menjadi lebih konkret, terutama yang industri migas yang kita idam-idamkan adalah dari hulu sampai kepada hilirnya. Jadi hilirisasi dan hilirisasi itu menjadi penting karena ini juga salah satunya menarik di dalam investor migas di tahun 2023.

Kemudian yang keenam saya usulan saya lebih konkret Pak yaitu mengenai *targeting converter* buat nelayan dan petani, tadi udah disinggung

oleh Pak Ramson, ini supaya ditambah lagi terutama adalah kita memetakan kabupaten-kabupaten mana yang membutuhkan dalam konteks ini.

Misalnya di dapil saya itu Pak Pading, di Pati, di Rembang itu kan nelayan yang banyak itu, terutama Rembang itu nelayan. Kalau di Blora sama di Grobogan itu pertanian di situ. *Nah* ini saya kira saya mohon atensi khusus khusus-khusus daerah itu sehingga apa namanya konversi BBM ke migas eh ke BBG juga. Jadi sekali lagi saya siap mengawal Pak kalau di Pati, di Rembang terutama untuk nelayan dan di Blora dan di Grobogan termasuk di Pati juga dalam konteks pertanian.

Kemudian yang ketujuh adalah menyangkut program konversi BBM ke BBG saya mengusulkan supaya sekali lagi ini dikawal betul dan apa namanya ini harus disosialisasikan dulu kepada Masyarakat, sosialisasi juga penting Pak dan dalam hal ini adalah Kementerian ESDM apa namanya konversi ini terutama untuk kebutuhan para pihak yang ada di, di Kementerian ESDM termasuk para pihak yang akan kita berikan di daerah-daerah tersebut itu.

Saya kira dapilnya temen-temen butuh semua Pak, apalagi ini sudah tahun politik dan tentu apa namanya sama-sama kita berbagi tugas dan kalau ini terjadi maka kami siap mengawal di dapilnya masing-masing Pak, terutama itu dan oleh karena itu konversi dari BBM ke BBG ini menjadi sangat penting sekali lagi di samping sosialisasi yang juga didampingi oleh kementerian apa namanya ESDM terutama di kedirjenan migas.

Yang ketujuh Pak, itu memang daerah tertinggal kita ini masih luar biasa banyak Pak dan di Jawa juga masih banyak dan itu membutuhkan perhatian khusus tentang jaringan gas dan oleh karena itu maka saya berharap jaringan gas ini buat semacam *region* tersendiri sehingga memudahkan untuk memitigasi daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang pinggiran, daerah-daerah yang tertinggal daerah-daerah yang memang membutuhkan yang jauh dari kota apalagi di daerah perbatasan Pak, itu karena memang itu salah satu perhatian pemerintah justru adalah membangun dari pinggiran.

Saya kira itu Pak Pimpinan apa yang saya sampaikan 8 poin ringan-ringan saja, mudah-mudahan, mudah-mudahan Pak Dirjen merespon dengan baik.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Marwan.

Selanjutnya karena Fraksi Partai Demokrat tidak hadir, Fraksi PKS Bu Diah silakan.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi VII,  
Pak Dirjen beserta seluruh jajaran.

Pertama saya mohon maaf tadi terlambat masuk ke dalam ruangan, yang ingin kami sampaikan yang pertama memang terkait dengan *lifting* Migas Pak. Jadi ini kalau dalam laporan dari kementerian kemudian berbahasa bahwa upaya harus ditingkatkan ya artinya kan sebetulnya berbicara pada diri sendiri ya *gitu*. Jadi yang harus kan berarti memang upaya kinerja dari kementerian dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan potensi tersebut, termasuk juga bagaimana menyeriusi berbagai macam potensi untuk kemudian dieksploitasi terusnya agar bisa menjadi apa peningkatan di dalam *lifting* migas itu.

Yang kedua, saya juga kembali ingin menegaskan tentang pengembangan jaringan gas Pak, karena LPG yang kita konsumsi hari ini *kan* sudah sama-sama kita ketahui ini adalah impor ya *gitu*, bisa dikatakan hampir semuanya impor. Karenanya mengembangkan jaringan gas termasuk ketersediaan infrastrukturnya itu harus menjadi program-program yang diprioritaskan, karena mau sampai kapan kita ini kemudian tergantung kepada impor LPG. Harus ada langkah-langkah serius dan konkret untuk mengembangkan masalah Jargas ini.

Yang selanjutnya terkait dengan ini Pak revisi Perpres 191/2014. Kalau saya lihat di laporannya di sini *kan* sudah diupayakan tetapi gagal terus *gitu* ya, tidak diberikan izin. Saya ingin mendapatkan penjelasan walaupun tadi mungkin sudah disampaikan saya tidak tau apa sih yang menyebabkan persetujuan izin prakarsa ini juga *nggak* keluar *gitu*, apa yang menjadi beban pemerintah untuk merevisi Perpres ini, padahal kan kebutuhannya nyata bahwa kalau Perpres ini direvisi ini kita juga bisa melangkah lebih, lebih pasti terkait dengan tata kelola migas terutama yang bersubsidi ya Pak ya *gitu*, tata kelola BBM ataupun LPG yang bersubsidi.

*Nah* selalu di dalam pertemuan-pertemuan itu disebutkan kunci persoalannya Perpres ini. *Nah* ini *kan* kita berupaya mengubah, tapi apa sih sebetulnya menjadi keberatan dari pemerintah untuk mengubah revisi ini *gitu*, apa persoalannya *gitu* sehingga kok sulit sekali *gitu* untuk melakukan revisi dari sebuah Perpres yang sudah sekian lama dan kondisi pada hari ini tentu sudah sangat berbeda pada dibandingkan dengan pada saat Perpres ini lahir seperti itu.

Terakhir Pak Dirjen, saya hanya ingin memberikan catatan saja terkait dengan pertemuan terakhir kita di Komisi VII. Waktu itu kita membahas tentang tata kelola LPG 3 kilogram bersubsidi ya Pak Dirjen ya itu, kita bahas di sini tentang bagaimana upaya agar misalnya baik itu rencana mau menggunakan aplikasi MyPertamina, baik itu rencana mau dibatasi bahkan dihilangkan mungkin tingkat pengecer dan lain-lain kita lumayan banyak berdiskusi di

ruangan ini, tapi kemudian saya dikejutkan ketika keesokan harinya muncul berita-berita di media massa yang merupakan hasil wawancara dengan Bapak menjelaskan bahwa mulai bulan Juni 2023 sudah ada pembatasan begini, nanti tidak boleh ada lagi LPG yang sekian kilo apa hanya dibatasi setiap orang harus berapa dan lain-lain itu tepat sehari sesudahnya, Pak.

Saya punya kliping korannya ya dan bahkan kalau di daerah saya itu jadi *headline*, jadi berita utama di halaman depan bahwa masyarakat ke depan dibatasi LPG 3 kg mulai Juni 2023 sampai menjadi pembicaraan Pak, saya diundang di beberapa radio, bahkan radio nasional juga ini bagaimana dengan rencana ini.

Yang saya sesalkan apa Pak, apa yang Bapak sampaikan kepada media itu tidak Bapak sampaikan di sini di ruangan ini rapat kita *nggak* bilang sama sekali tentang *timeline* waktu pada saat itu, mungkin bisa dilihat juga dari notulensi rapat kita pada saat itu dengan berbagai macam kesimpulannya. Jadi kami di sini tidak membahas sedetail itu, tiba-tiba di media muncul dan itu mengutip wawancara dengan Pak Dirjen.

Jadi saya merasa pada saat itu ini gimana *gitu* ya, ke kita tidak disampaikan ke media disampaikan, informasi yang kita sama sekali belum sepakati apapun di sini *gitu* ya. *Nah* ini bisa kita ini Pak dan saya setelah itu banyak diwawancara *gitu* terkait dengan, karena langsung resah di tengah masyarakat ya padahal ini masih baru sebuah perencanaan wacana yang kita bahkan *timeline*-nya pun belum kita bahas di sini *gitu* tapi di media tersebut sudah langsung Juni 2023 dan seterusnya.

*Nah* ini saya hanya ingin memberikan catatan saja Pak karena memberikan informasi yang meresahkan masyarakat sambil informasi itu juga belum jelas menurut saya juga bermasalah Pak *gitu* ya. Kasihan masyarakat Pak direpotkan terus dengan isu-isu yang mungkin perencanaan juga belum-belum pasti dan belum jelas *gitu* seperti itu, ini catatan saya saja supaya ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Bu Diah.

Lanjut Ibu Doktor Andi Yuliani Paris.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Pak Eddy, Pak Dony,

Yang saya hormati Pak Dirjen Migas beserta jajarannya di sini hadir beberapa direktur, dan juga Bapak, Ibu Anggota Komisi VII.

Pertama Pak Dirjen, waktu kami rapat minggu lalu sebelumnya ketika Pak Menteri berbincang-bincang ruang pimpinan sebelum rapat ada pemikiran untuk memudahkan Kementerian ESDM dalam rangka program konversi 2023 tidak menyebut secara spesifik berapa untuk nelayan, berapa untuk petani, itu memudahkan. Karena tidak akan memusingkan ketika misalnya anggota yang ini lebih ke petani, yang ini ke nelayan.

Nelayan ini 20.000 Pak, coba dihitung berapa sebenarnya yang dibutuhkan tahun 2023 untuk nelayan. Contohnya di dapil saya banyak nelayan Pak, tapi 2023 ini saya agak *deny* ribuan data nelayan itu. Kenapa, pertama nelayan itu kartu Kusuka-nya di ujung jari penyuluh, penyuluh terserah siapa yang dia mau bikin kartu Kusuka, tanpa kartu Kusuka tidak akan ada keluar tidak akan dapat nelayan itu ya.

Dulu Pak, sebelum saya terlibat di dalam urusan ini secara detail pertama kali 2017 Kementerian ESDM membagi di Sulsel, itu banyak kartu Kusuka yang dikeluarkan oleh penyuluh bukan untuk nelayan, nah mulai sesudah itu saya agak detail betul-betul apa memperhatikan kartu Kusuka. *Nah* di tahun politik ini justru menjadi sangat rawan, karena yang bisa membuat kartu Kusuka hanya penyuluh, dia punya *password*-nya dan itu *link* Kementerian KKP. Kepala Dinas aja *nggak* bisa akses, Pak.

Malah ada cerita nih, kepala dinas satu kabupaten sama saya sampai dibohongin sama penyuluhnya sendiri. Kepala dinasnya cerita sama saya, karena ketika dia ke suatu tempat banyak nelayan komplain ke dia kepada kepala dinas kenapa dia tidak pernah jadi kartu Kusukanya akhirnya penyuluhnya dipanggil oleh kepala dinasnya, Oh ini alasannya server-nya *down*, akhirnya kepala dinasnya cerita sama saya, saya saja kamu bohongin.

Jadi oleh sebab itu memang tadi Pak Marwan ada beberapa teman yang perlu *converter* nelayan. Coba dihitung Pak, maksud saya 20.000 itu besar ketika Bapak sendiri mendengar rapat yang lalu bahwa mayoritas teman-teman lebih membutuhkan *converter* untuk petani. *Nah* itu catatan pertama, apakah bisa ini Pak saya nanti mohon dijawab atau interaktif izin ketua, saya izin ya. Pak Ketua, saya *nggak* mau bicara kalau *nggak* dikasih Pak Ketua izin boleh interaktif. Pak apakah memungkinkan ini digeser tidak Pak, misalnya dari 20.000 nelayan menjadi 10.000 kemudian menjadi 40.000 petani memungkinkan *nggak*, Pak?

#### **DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Jawabannya memungkinkan Bu, itu bisa kita lakukan. Makanya kita sekarang ini Pak Laode saat ini sudah mulai meminta data tersebut, kalau itu nanti berubah dasar itu yang kita pakai untuk merubah alokasi tadi jadi sangat memungkinkan. Hanya saja kalau di *blend gitu* Bu ya ini kita lihat apakah syarat administrasi bisa tidak, karena *kan output*-nya beda kita mencantumkan administrasi tersebut, tapi kalau merubah dari awal nelayan tadinya 20.000

berubah *gitu* Bu ya, petani berubah 30.000 menjadi berapa itu bisa di data yang dihasilkan dari sini.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Karena begini juga Pak Dirjen itu lebih murah walaupun catatan saya Pak ini yang diminta oleh ESDM setiap tahun untuk nelayan itu naik-naik terus nilainya dari 8,5, 9, 9,5 sekarang udah 10.000.000 ini per paket Pak coba Bapak hitung naik setiap tahun 10.000.000, padahal *kan* seharusnya harapan kita dengan menggunakan TKDN atau makin lama *kan* ketika dibeli dalam jumlah yang semakin banyak barang itu akan menjadi semakin murah Pak, ini mudah-mudahan *ngga* jadi temuan ya KPK ya.

Ini harusnya makin murah, ini udah 10 juta per 1 nelayan. Bayangkan Pak, Bapak menghitung 208,18 miliar itu untuk 20.000 *converter* nelayan, jadi 1 *converter* 10 juta, sedangkan untuk 30.000 petani 259,53 miliar, hanya beda untuk 10.000, ada 20.000 apa 30 itu hanya bedanya cuma di angka berapa ya 51 miliar. Jadi 2.000, 259 miliar itu untuk 30.000, kemudian 208 miliar untuk 20.000 nelayan.

Jadi caranya mungkin gampang Pak, menghitung kembali totalnya Ini kan ada sekitar 467 miliar 700 eh koma tujuh satu M ya itu totalnya, coba dihitung kembali. Saya dapat info sekarang ini data yang masuk nelayan, saya pun karena masukin nelayan palingan cuman 100 Pak dari beribu-ribu yang saya punya datanya, yang sudah saya validasi, saya *nggak* mau dulu Pak, karena saya *nggak* mau *converter* kartu Kusuka itu menjadi kepentingan-kepentingan penyuluh dan penyuluh itu *kan* di bawah bupati Pak, kalau bupati warnanya lain sama saya Pak susah Pak, malah penyuluhan kadang-kadang bikin kartu Kusuka kalau *nggak* saya semprot penyuluh nya dia minta duit kepada nelayannya karena *nggak* bisa dapat barang *kan* kalau *nggak* punya kartu Kusuka ya.

Jadi saya kalau di dapil saya katakan, “Ibu, Bapak, Ibu penyuluh jangan tolong ini untuk rakyat kecil, jangan yang kau suka yang kau bikin kartu Kusuka ya, jangan yang kau suka karena kartu Kusuka itu wajib”, dan jahatnya juga Pak kadang-kadang yang dia tidak suka oleh penyuluh dan menurut saya dia layak, miskin dan nelayan beneran dibikin kartu Kusukanya bukan nelayan Pak, pembudidaya rumput laut tambak, mainannya di situ Pak. Kalau kartu Kusuka, mungkin Bapak *nggak* ngerti, mungkin yang kalau kartu Kusukanya pembudidaya rumput laut atau pembudidaya ikan sama dengan tambak itu, itu *nggak* bisa dapat Pak dan biasanya mainannya penyuluh di situ.

*Nah* makanya saya berharap di tahun 2023 ini memang ada beberapa teman-teman tadi Pak Marwan dia butuh ada yang butuh, tapi mayoritas yang saya dengar itu rata-rata petani. Jadi saran konkret saya Pak, tadi-tadi *reasoning*-nya saja ya dan itu juga lebih dapat banyak karena dengan 259 M saja bisa dapat 30.000, apalagi kalau di *shifting* yang separuh dari 208 miliar ke petani itu akan dapat lebih banyak lagi untuk petani, karena teman-teman lebih banyak butuh petani, saya pun lebih banyak butuh petani dan nelayan tapi nelayan saya *nggak*, saya *nggak* mau tahun ini Pak, karena saya agak repot juga, karena kartu Kusuka itu menjadi komoditas dari mohon maaf dari

oknum-oknum, saya tidak mengatakan dinasnya ya, oknum-oknum di Dinas Perikanan, kasihan kadang-kadang petaninya dan kalau kita itu yang benar-benar berhak dapat itu *nggak, nggak dapet gitu* loh ya.

Jadi saya menyarankan satu Pak, tolong pasti setuju, Pak Menteri juga saya sudah bicarakan pada pertemuan yang lalu dihitung kembali, mungkin konkit nelayan 10.000 saja ya karena saya juga dengar data yang baru masuk 5.000.

Saran saya juga Pak, kalau bisa Pak saya memang tau dinas-dinas di luar dinas-dinas perikanan pertanian di luar dapil anggota juga mengusul, itu jangan jadi prioritas lah Pak, prioritasnya itu adalah usulan dari teman-teman, ini saya berbicara untuk teman-teman nih Pak ya.

Seperti contoh ya misalnya kalau yang dulu-dulu saya lihat ya contoh waktu jaman Pak Jonan, mungkin karena Dirjen Migasnya orang Bali, Karangasem terus Karangasem itu *converter*-nya ya, cuman ya saya ya saya ngomong sih Pak, padahal *kan nggak* ada anggota dari Dapil Bali waktu itu ya *kan*. Jadi maksud saya kalau bisa, kalau bisa ini semuanya diutamakan untuk dapil anggota dulu Pak, nanti 2024 Bapak mau ke negeri mana pun terserah Bapak lah *gitu* loh, mungkin Bapak mengerti maksud saya.

Jadi pertama itu *shifting* saja Pak untuk nelayan, saya pun banyak data nelayan tapi saya *nggak* ajukan ke kementerian, saya *hold* dulu karena di tahun 2023 ini kemarin 2022 aja saya berantem terus Pak dengan dinasnya karena orang yang berhak itu dia *nggak* ada namanya Pak udah di validasi oleh Kementerian ESDM *nggak* diundang ambil barangnya oleh Dinas Perikanan, supaya dia tau supaya orang-orang ini *nggak* datang supaya dinasnya nanti mau ngambil, terus dia mau kasih orang, orangnya *nggak* bisa. Detail saya tau, eh kamu datang ambil barang saya bilang, ada namamu di sini kok udah di *approve* oleh dinas, oleh Kementerian ESDM. *Nah* itulah saya minta Pak kalau bisa di *shifting* aja Pak ke petani sehingga dibandingkan dengan konkit hanya 10 juta per buah dan petani ini murah cuman 8,3 apa 8,5 ini kalau *nggak* salah kalau saya hitung itu.

Kemudian kedua Pak terkait dengan, saya tadi udah telepon Pak SKK Migas, saya bilang kamu ini kerjanya lama banget sih saya bilang begitu. Masa saya udah 1 tahun minta surat dari SKK Migas ke Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk alokasi gas untuk BUMD di Kabupaten Wajo ini harus bertahun-tahun, tapi tadi dikatakan oleh Pak Syarif hari ini maju ke meja Kepala SKK Migas dan segera dikirim.

Jadi mohon di bantu, ini menjadi hutang saya yang harusnya pertanggungjawabkan ke masyarakat karena Wajo itu *kan* banyak Pak, gasnya tapi *kan* harusnya bisa meningkatkan penghasilan pendapatan daerah sehingga infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih bisa dibangun, ini mohon bantuannya, Pak. Jadi saya ingin ketegasan bahwa, konkit nelayan dikurangi ke konkit petani lah dinaikkan apalagi *kan* cukup banyak yang di-di *automatic adjustment* tuh 7.000 lebih.

*Nah* kalau naik walaupun nanti dikonversikan bisa jumlahnya tidak 22 ribu lagi untuk petani, bisa 30 ribu bisa berapa. Nanti pertolongan kamilah Pak untuk teman-teman juga yang kemarin ada dari Sumatera Utara petani, termasuk Pak Eddy mungkin petani, Pak Pimpinan di 2-2 depan itu *kan nggak* nelayan *gitu* dan nelayan memang sangat *complicated* Pak, dibandingkan petani, sangat *complicated* sudah *gitu* mahal lagi 10 juta barang ini untuk pengalaman, saya *alhamdulillah* ya saya berhasil Pak karena saya nungguin Pak saya 2 bulan di dapil nungguin pembagian itu supaya tempat sasaran, supaya tidak di main-mainin oleh dinas dan harus betul-betul nelayan yang membutuhkan Pak jangan sampai bukan nelayan yang tidak membutuhkan walaupun ya banyaklah harus kuat-kuatan *gitu*.

Makasih, Pak. Makasih, Pimpinan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, Ibu Andi Yuliani Paris atas pertanyaan diajukan.

Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan di Komisi VII, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Dirjen. Mohon izin kepada Pimpinan anggota untuk mengajukan pertanyaan.

Pak Dirjen, ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti dijawab terkait pertama Pak proyeksi *crude* Pak ke depan, ya paling tidak satu tahun ke depan proyeksi *crude* di Kementerian ESDM seperti apa, apakah masih sesuai dengan proyeksi yang kita tetapkan di dalam APBN.

Kedua Pak, kita sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat kita dengan PGN, kita juga ingin mengetahui ketersediaan atau pencairan anggaran untuk kelanjutan proyek Cisem, itu juga menjadi sebuah pertanyaan Pak.

Lanjut, kami juga tadi membaca dan melihat apa yang Bapak Dirjen sampaikan terkait proses revisi Perpres 191 Tahun 2014, dan kami sangat prihatin Pak Prof bahwa proses itu masih berjalan saat ini. Sementara kita sejak April 2022 sudah mengangkatnya di dalam RDP bahwa perlu dilaksanakan, itu kami, kita bicarakan dengan rekan-rekan dari BPH Migas ketika itu.

*Nah* jadi masih merupakan tanda tanya besar bagi kami kenapa masih belum selesai, semakin lama Perpres itu tidak direvisi tentu semakin terjadi pemborosan terhadap BBM bersubsidi kita yang ujungnya juga merupakan pemborosan anggaran bagi kita. *Nah* ini juga merupakan tanda tanya bagi kami dan kalau tadi Pak Dirjen tadi sampaikan di dalam pemaparannya bahwa prosesnya itu sekarang masih menunggu, ya maksud saya, pihak pemerintah saja yang diwakili dalam hal ini oleh Pak-Pak Dirjen Migas, masih menunggu prosesnya itu berjalan apalagi kami Pak. Ya jadi kami sangat apa namanya

*concern* terhadap hal ini dan tentu itu nanti akan kami kesimpulan rapat agar bisa dipercepat proses ini, Pak.

Berikut juga Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang Patijaya tentang pemberlakuan B35. Tentu kami apresiasi kebijakan itu, tetapi yang ingin kami juga dapatkan kejelasan apakah B35 itu dipakai secara umum di negara-negara di seluruh dunia atau di negara-negara yang memberlakukan kebijakan B30 dan ke atas itu Pak kita harus tau. Kami hanya di Indonesia saja yang saat ini menggunakan B35, dan ini membutuhkan investasi yang juga tidak kecil untuk bisa mengakses, meningkatkan saat ini penggunaan B30 menjadi B35.

Hal ini kita lihat Prof bahwa, sebagai ininya konsekuensi dari kebijakan ini ya masalah pangan menjadi ini menjadi ini, persoalan di lapangan sehingga ada-ada terjadi kelangkaan dari minyak goreng dan kebetulan itu membuat bos saya sakit kepala, Prof.

Kemudian terakhir Prof, ya kita saat ini sedang melakukan memulai, kita sudah *kick off* untuk pembahasan revisi Undang-Undang Migas. Kita sudah melakukan memulai untuk melakukan pembahasan-pembahasan *public hearing* dengan berbagai asosiasi dan pihak-pihak terkait dan kami juga ingin mendapatkan masukan-masukan juga dari Dirjen Migas dan itu bisa kita laksanakan secara berkesinambungan proses itu, tetapi kapan saja ada waktu untuk kita melakukan diskusi dialog terkait hal, hal ini saya kira perlu kita lakukan sambil proses formal itu berjalan agar kita betul-betul mendapatkan masukan komprehensif terkait revisi ini, jadi merupakan momentum baik bagi kita untuk melakukan revisi Undang-Undang Migas yang mudah-mudahan bertujuan dan akan mendapatkan *output* yang baik untuk akselerasi dari kebijakan dan akselerasi dari kegiatan migas kita secara keseluruhan, karena bagaimanapun juga saya dengan berat hati harus menyampaikan Prof bahwa teman-teman di Komisi VII ini ketika setiap kali kita melihat pemaparan dari pemerintah tentang target 1 juta barel tahun 2003, tahun 2030 kami merasa itu sebuah Fatamorgana Prof, seakan-akan kok kita membohongi diri kita sendiri dengan melihat merujuk kepada kenyataan yang ada hari ini.

Mungkin itu Prof yang bisa kami sampaikan, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan di ruangan ataupun yang bergabung secara *virtual* saya persilakan Pak Dirjen Migas untuk bisa memberikan tanggapan. Saya kira ringkas saja Prof, nanti yang lain-lain detailnya bisa disampaikan secara tertulis, kami persilakan.

#### **DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Baik, terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII,

Terima kasih sekali atas masukan-masukannya dan arahnya. Tadi yang pertama tentang BBM satu harga kita akan terus dukung bersama BPH Migas, saat ini realisasi 423 nanti 2023 akan 89, 2024 akan 71 sehingga totalnya 583, jadi kita tunggu bersama Pertamina karena ternyata memang

tidak, secara volume tidak terlalu besar jadi bisa tapi sangat membantu seperti halnya konkit, jargas itu secara alokasi dana tidak terlalu besar tetapi sangat membantu masyarakat.

Kemudian tentang konkit tadi banyak yang dibahas, kami tetap berusaha Bapak, Ibu sekalian Bapak Pimpinan Anggota yang terhormat bahwa, untuk terkait *automatic adjustment* kita masih berusaha terus melalui sekjen ya dan untuk sampai ke Kementerian Keuangan. Memang apa yang dihasilkan dari rapat ini saya kira bagus Pak Pimpinan, Pak Eddy untuk bisa dimasukkan ke dalam kesimpulan supaya melalui dukungan data kami disampaikan ke kementerian yang berwenang.

Kemudian berkaitan dengan hal-hal lain misalnya B35 ya, 35 itu memang Indonesia *leading* di mata dunia yang seperti di India saja masih dikit sekali yang lain juga sedikit, Malaysia juga belum, jadi kita akan jadi percontohan untuk B35 ini bagi negara-negara lain. Dan kita memang perlu terus menjaga, *safety*, keamanan dari kendaraan yang menggunakan ya.

Kalau prosesnya selalu kita dahului dengan penelitian di laboratorium kemudian di jalanan dan bagaimana pertambahannya bisa mempersiapkan fasilitasnya untuk hal ini. Jadi dalam hal ini kita terus, terus melakukan ini, karena memang bisa menghemat, menghemat impor BBM solar kita *kan* cukup banyak.

Jadi seluruh produksi tahun 2021, 2022, 2021 lah itu minyak yang ada di Indonesia itu dimasukkan dalam kilang, 7 kilang Pertamina dimasukkan oleh kilang dari produksi nasional bagian pemerintah Indonesia dimasukkan dalam kilang, dan nanti produksinya kurang lebih plus, plus *import crude* produksinya kurang lebih 400 ribu *oil per day*, barel *oil per day*, barel *product per day* masih kurang untuk kebutuhan kita yang 1,3 jadi kita *import* juga BBM.

*Nah* untuk impor BBM itu dengan adanya B35 ini, mengurangi impor, impor BBM. Jadi turun ya kebutuhannya, BBM akan, solar itu akan turun 1,22 juta kiloliter jadi cukup signifikan untuk penghematan di B35 itu, tinggal dikalikan harganya Pak ya.

Kemudian untuk tadi konkit nelayan petani, anggaran yang disampaikan saat ini tidak belum *fix* ya, jadi nanti masih tergantung dari masukan daftar dari dapil masing-masing dapil dan dapil anggota untuk bisa kami konsolidasi, tapi memang ini kita berubah secepat mungkin, bulan-bulan ini supaya kita punya waktu. Kalau kemarin kita betul-betul mepet pagu tahun 2022 itu, jadi harapannya kita bisa kerjakan saat ini kalau ada perubahan masih ada waktu, harapannya di tengah tahun ini atau bulan Juli atau Agustus itu sudah, sudah bisa selesai.

Untuk daerah 3T Pak, bagusya kami coba bekerja tapi persoalannya demikian, bahwa di Papua itu belum ada tangki timbun, yang sekarang baru dibangun tangki timbun tahun 2023 baru selesai, nanti dengan itu LPG bisa masuk jadi kita nunggu pembangunan tangki timbun dulu.

Masukkan yang banyak dari Pak Marwan Jaafar juga kita akan *follow up*, tentang investasi yang jadi masalah besar sebetulnya masalah investasi untuk kilang karena kilang merupakan infrastruktur. Contoh, sebagai contoh kilang di Tuban, di area Tuban, itu membutuhkan fasilitas jalan tol dan kereta api, *nah* keduanya berhubungan dengan Kementerian PUPR dan itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Kalau tidak ada jalan tol dan kereta api investor kurang, kurang bisa menghitung secara ekonomis, keekonomiannya kurang bagus karena bagaimana distribusinya, jadi hal seperti itu terkait dengan sarana prasarana yang ada di Kementerian yang ada di Indonesia ini jadi perlu ini, bisa di adakan dulu.

Kemudian tentang yang lain-lain saya kira pemerintah telah mencoba semenarik mungkin membuat *terms and condition*, sekarang udah ada lagi Pak Eddy bahwa 85, 5 plus sudah ada jadi kita *start* dari 80. Makin tinggi resiko untuk gas kita 50:50, 50% pemerintah, 50% K3S seperti dicontohkan di WK Agung yang dikelola oleh BP dan ini ke depan di dalam RUU Migas kita harapkan bisa diakomodir, beberapa fundamental reformasi dalam pengelolaan Migas ini termasuk nanti ada *renfrenching assume and discharge*, kemudian *tax, tax and royalty* pun akan kita tawarkan. Jadi dalam RUU Migas ini kita akan mencoba lebih reformatif, lebih fundamental untuk merubah supaya menarik.

*Nah* investasi ke depan seperti apa kalau ditanyakan Pak manajemen strategis, kita akan banyak mengarah ke era transisi gas, gas sebagai alat transisi. Untuk itu kita, kita betul-betul akan mengupayakan CCS/US ini berjalan, karena (*unable 1.34.08*) di CCS/US, karena lapangan minyak gas Indonesia sebagian besar mengandung CO<sub>2</sub>, kalo kita tembuskan pasti mengandung CO<sub>2</sub>.

*Nah* gimana kita tembuskan lapangan itu kalo mengandung CO<sub>2</sub>, ya teknologi CCS/US menjadi penting karena kita akan tangkap CO<sub>2</sub>-nya kita akan masukkan dalam tanah sehingga Indonesia tidak disebut sebagai negara yang tidak membutuhkan lingkungan tapi kita akan mencoba ini berhasil ya.

Jadi revisi Permen kita atau bukan revisi, Permen kita yang tentang CCS/US sudah dalam tahap selesai harmonisasi ya kita harapkan tahun ini bisa dikeluarkan karena itu akan menaungi sekitar 16 *project* CCS/US. Kalo ini ditotalkan investasinya besar, 1 *project* terbesar CCS/US di Papua Barat yang dilakukan oleh BP itu hampir 2, itu sekitar 2,6 million US dolar 1 *project* untuk mengisikan sekitar 25 Juta CO<sub>2</sub> di dalam 10 tahun. Jadi ini ada 15 *project* dan jadi bisa kita bayangkan investasi yang sangat besar kalau ini bisa berhasil dilakukan.

Kemudian tentang *lifting* ya *lifting* yang betul, ada dua kalau menurut saya yang harus kita serius tangani, pertama adalah eksplorasi yang emang harus masif. Kita sudah mempunyai bentuk tim juga untuk hal itu dan saat ini kita cukup agresif nanti bisa kita laporkan informasi apa saja yang akan, lapangan mana saja atau WK mana saja yang akan kita eksplorasi. Cukup kencang kita untuk eksplorasi tapi saya tidak laporkan di situ, tapi kita sudah mengarah ke sana.

Yang kedua adalah masalah teknologi baru. Karena lapangan minyak di Indonesia itu sebagian besar tua. Coba kita, kita cari angka ya. Jadi produksi kita itu sekitar 32% dari volume yang ada di bawah sana. Kalau volume kita ada di 30% itu kondisi dilapangan itu sudah sangat tua, kita harus pakai teknologi baru, teknologi baru misalkan NH *solid recovery* dan yang lain. Jadi kalau itu kita tidak berani melakukan dengan insentif yang bisa membuat itu jalan, saya kira *nggak* akan naik produksi, akan tahan saja, apa yang kita lakukan saat ini, itu hanya nahan *decline*. Jadi yang bisa naikan *kick off* produksi kita hanya 2, eksplorasi dan teknologi baru termasuk (*suara tidak jelas 1.36.25*) *recovery*. Tadi kita yang berusaha keras untuk itu, karena membutuhkan insentif yang tinggi kalau (*suara tidak jelas 1.36.31*) *recovery*.

Yang kedua tadi kalau revisi Perpres 191 pertanyaan tentang apa yang menjadi hambatan itu sebetulnya secara draf substansial di kementerian kami sudah siap. Hampir katakan kalau dikatakan sudah *final* ya sudah *final*. Itulah *stand* posisi di Kementerian ESDM, tinggal proses yang dikeluarkan dari kita ini yang masih kita upayakan tapi dari sisi substansi sudah selesai.

Untuk Ibu yang, Ibu Diah tadi tentang berita tadi, saya bisa katakan tidak benar. Saya bukan orang yang mengatakan A kemudian mengatakan B besoknya, tidak, saya bisa jamin itu. Itu integritas, kalau itu ada berita sampaikan ke saya, dan kita panggil wartawannya.

Saya pernah konfirmasi itu dengan wartawan yang menyatakan hal yang tidak benar, saya katakan tidak benar, kalau kamu katakan yang benar, saya akan tetap saya hormati, tapi kalau sesuatu tidak benar dikatakan, saya akan kejar. Jadi begini.

#### **F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Pimpinan mungkin sedikit. Ya, yang pertama Pak terkait dengan pemberitaan tadi, Bapak bisa lihat di media massa yang sekitar tanggal 13 Desember 2022 itu banyak yang mengutip pernyataan Bapak itu ya. Jadi mungkin nanti bisa dicek pemberitaan itu. Kalau yang tadi saya ceritakan di cover depan itu ada di Harian Pikiran Rakyat Pak, itu jadi *cover* depan di halaman besar di halaman depan dengan bahasa yang menakut-nakuti masyarakat begitu ya seperti itu, jadi Bapak bisa cek sendiri apa yang saya sampaikan tadi.

Yang kedua tadi terkait dengan Perpres. Saya percaya bahwa dari Kementerian ESDM itu sudah berupaya maksimal *gitu* ya, justru yang saya tanyakan itu mengapa respon itu lambat *gitu*, apa yang menjadi keberatan apakah itu dari pihak Setneg atau dari apa *gitu* untuk menindaklanjuti ini, apakah memang ada kajian yang dianggap bahwa usulan revisi Perpres ini tidak pas waktu atau substansinya memang misalnya masih belum apa ya yang diinginkan atau bagaimana *gitu*, apakah yang ngegantung itu *kan* biasanya kita harus tau apa alasannya *gitu* kenapa ini *nggak* diproses lebih lanjut *gitu*.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Itu yang perlu, yang itu yang akan kami cari tau juga. Kita pernah berkomunikasi Bu, tapi kita belum berhasil sebetulnya apa yang menjadi permasalahan. Jadi yang pertama yang telah kita upayakan setelah selesai dari draf tersebut adalah izin prakarsanya beralih dari Kementerian BUMN ke Kementerian ESDM. *Nah* kalau itu sudah selesai prosesnya kita akan segera selesaikan dalam 1-2 minggu juga kita bisa sudah siap. Jadi saya terus terang saja, saya tidak mengetahui apa yang menjadi kendala, saya tidak, sampai saat ini saya belum tau.

*Nah* tentang yang disampaikan tentang di berita tadi akan saya cek saya konfirmasi. Jadi begini, yang kita sampaikan seperti yang di sini bahwa kita melakukan registrasi itu Bu, tidak ada kata pembatasan, registrasi. Memang registrasi itu perlu kita lakukan dalam rangka apa, bahwa siapa yang diberikan LPG subsidi 3 kilogram itu memang yang, itu yang registrasi. Tahun ini itu aja, registrasi. Jadi kita tidak akan melaksanakan pembatasan di tahun ini, jelas, jadi kita akan melakukan registrasi saja, yang dilakukan Pertamina adalah melakukan *piloting, piloting* dan sudah selesai tinggal ke depan adalah memperluas registrasi tersebut dengan perangkat teknologi informasi.

Kemudian yang lain aspirasi yang lain tentang konkrit tadi kami akan perhatikan usulan seperti Bu Andi dan Bapak, Ibu yang lain, kami akan perhatikan dan coba tindaklanjuti nanti kita berkomunikasi dan monitor perkembangannya supaya bisa pada waktu terakhir diketok itu angkanya sudah sesuai antara usulan kita dan apa yang diinginkan oleh Bapak, Ibu sekalian sebagai wakil dari masyarakat.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Izin, Pimpinan, izin Pimpinan.

Jadi dihitung kembali Pak, misalnya dengan 259 itu *kan* bisa 30.000 lebih, dapat lebih banyak *kan*. Mungkin dihitung lagi aja beberapa anggota yang mungkin membutuhkan konkrit nelayan yang memang sebenarnya agak *complicated gitu*, konkrit nelayan itu ya.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Interupsi, Pak Ketua.

Pak Dirjen, saya mendukung usulan Bu Doktor Andi, karena memang sulit untuk memenuhi syarat untuk para nelayan. Di daerah saya cukup banyak nelayan, tapi *kan* ada syarat PK-nya Pak Dirjen, di sana ribuan nelayan, tapi hanya bisa memenuhi syarat 100. Jadi saya mendukung agar di *switch* ke konkrit petani, jadi yang banyak itu petani, populasi petani kita lebih banyak termasuk di daerah pemilihan saya, juga syaratnya lebih mudah. Kalau nelayan itu *kan* ada yang kapalnya ada tingkatannya stratifikasinya, padahal kalau udah agak tinggi PK-nya mungkin di atas 5 PK dia tidak bisa dapat lagi, sesuai syaratnya.

Jadi udah ditelusuri itu nelayan-nelayan itu sulit untuk dapat, untuk memenuhi syaratnya. Jadi itu bahan pertimbangan Pak Dirjen agar yang konkrit nelayan dikurangi, yang diperbanyak konkrit petani.

Makasih, Pak Dirjen.

#### **DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Terima kasih, Pak Ramson.

Kemudian untuk Pak Eddy ya, yang dimaksudkan proyeksi *crude* itu apakah harga atau volume Pak Eddy? Proyeksi *crude* apakah harga atau volume? Oh harga.

Jadi kalau kami memantau terus hari ke hari ternyata tidak, tidak turun lagi harga itu mulai naik lagi sekitar 90 lagi. Jadi angka 90 itu kalau menurut saya *range* yang cukup baik atau *available* menurut saya di tahun ini, karena turun ke 75 *nggak* mau lagi inginnya naik lagi 90 jadi berada di situ. Tapi kalau sampai 100 tampaknya tidak juga. Jadi kalau proyeksi kami kurang lebih harga di 90-an di *range* 90-an memang. Jadi itu yang kalau dari hasil sejarah.

Jadi kita selalu melihat bagaimana kalau nilai 75 berapa, berapa lama dia bertahan, tapi naik dikit lagi, nanti kalau terlalu tinggi dia turun lagi jadi ada upaya antara *range* 80, 90 itu kalau saya melihat jadi kenyamanan. Saya sendiri memperhatikan kalau di negara-negara Timur Tengah terutama Saudi Arabia itu nyamannya diangka di atas 70 Pak, 70-an ini akan nyaman *kan*. Karena 90% APBN Saudi Arabia itu dari minyak, jadi kalau terlalu rendah dia akan habis APBN-nya.

Kemudian tentang kelancaran angka proyeksi untuk tahap 1 *kan* sudah ada Pak, sampai Batang ya, Batang ini progres 76%, jadi mudah-mudahan ya Agustus atau mungkin lebih cepat bisa selesai kalau yang tahap 1, untuk yang tahap 2 ini memang karena sebelumnya tidak didahulukan, sehingga kita mengusulkan untuk jumlahnya tidak terlalu besar dulu sekitar 600 ya, tapi nanti totalnya *kan* 2,4 tadi itu eh *sorry* maaf tiga koma sekian, 3,4.

Karena dilanjutkan langsung ke Kandanghaur Timur, sebelumnya *kan* dari Semarang ke Cirebon, tapi ternyata pipanya itu yang dari Cirebon ke nyambung lagi atas itu kecil pipanya jadi kita mau samain 20 inch, jadi dari Cirebon disambung ke KHT, Kanal Timur nanti ke baratnya sudah pakai pipa yang besar, *nah* karena tambahan itu jadi semula ada tambahan permintaan kita sebesar sekitar tiga koma 3,4 triliun untuk itu, untuk yang sampai dari Batang sampai ke Kandahar Timur 241 Kilometer. *Nah* ini baru dimintakan 600 m masih cukup banyak, jadi akan 3 tahun, 3 tahun kita jalan ke depan.

Saya kira demikian yang oh tentang satu lagi tentang RUU Migas. Terima kasih sekali kami sangat berharap ini bisa diselesaikan tahun ini, karena itulah cikal bakal atau dasar dari bagaimana kita mengelola migas itu menjadi menarik, karena kalau kita tanya saja ya Pak, sesimpel aja investor bertanya satu yang sangat simple Pak, SKK Migas itu *kan special task force*, pertanyannya kenapa *special task force* yang menangani ini, se-simpel itu Pak.

Perusahaan-perusahaan industri besar, dia mau investasi sekian billion dolar berhadapan bukan dengan institusi yang, lembaga yang betul-betul mempunyai landasan undang-undang, jadi itu yang perlu kita, kita menjadi harapan kita supaya *fix*, supaya bisa direvisi Undang-Undang Migas tahun ini. Kemudian sekalian tentang substansi kita bisa menyampaikanlah pendapat-pendapat kami untuk bisa di, untuk bisa dikaji bersama di sini ya.

Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Dirjen.

Mungkin catatan dari saya Pak sedikit tentang Cisem itu, *kan* memang kita dari awal Cisem itu *kan* menjadi proyek yang dikerjakan oleh swasta. *Nah* tetapi beralih karena memang tertunda beralih menjadi proyek dikembangkan menggunakan APBN. *Nah* kami berharap bahwa, dengan penggunaan APBN justru proyek itu bisa cepat selesai, rampung, rampung, cepet rampung jangan nanti justru tertunda karena adanya kelambat-lambatan dalam pencairan dana dari APBN tersebut *kan* tidak, nanti tidak akan memenuhi objektif utama untuk mempercepat proses penyelesaian proyek Cisem tersebut.

Baik Ibu-Bapak sekalian,

Mari kita lanjut ke pembacaan draf kesimpulan rapat, kebetulan jam 12.30 kita harus hentikan karena akan ada rapat paripurna, tolong ditampilkan. Udah, baik.

*Draf* kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI Selasa, 14 Februari 2023.

1. Komisi VII DPR RI, tolong di *zoom in*, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI agar menjaga keberlangsungan kepelaksanaan program BBM satu harga untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.

Bagaimana Pak Dirjen, setuju ya baik.

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak agar alokasi jenis BBM khusus penugasan JBKP dan jenis BBM tertentu JBT dapat tercapai tepatsasaran sesuai APBN 2023.

Bagaimana Pak Dirjen, setuju ya baik.

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

3. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mengalokasikan lebih banyak konkit petani di tahun 2023 dengan menghitung kembali kebutuhan konkit petani yang harganya dengan anggaran tersedia sehingga bisa mendapatkan jumlah konkit petani yang lebih banyak.

Ini gimana ya kalimat ini, dengan menghitung kembali kebutuhan konkit petani dengan anggaran tersedia, saya pikir yang harganya *nggak* perlu.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Mungkin gini Pak, saya bisa bantu nih. Komisi VII mendesak Dirjen Migas untuk apa ya bahasa Indonesianya men-*shifting* konkit nelayan ke konkit petani sehingga konkit petani bisa lebih dari 30.000 kira-kira *gitu* aja katanya titik langsung, *kan* sekarang 30.000 tuh Pak, 30.000 ini, *nah* kalau di *shifting kan* bisa lebih dari 30.000 itu maksudnya kira-kira begitu, Pak. Nelayan ini *kan* 20.000.

**KETUA RAPAT:**

*Shifting* dari nelayan ke petani atau.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Dari nelayan ke petani.

**KETUA RAPAT:**

Oh *gitu*, kalau *nggak*, untuk meningkatkan alokasi, meningkatkan alokasi konkit nelayan *sorry* petani, petani di tahun 2023.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Meningkatkan konkit petani dengan men-*shifting*.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak*, melalui pemindahan atau pengalihan.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Melalui pengalihan.

**KETUA RAPAT:**

Melalui pengalihan anggaran.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Mungkin sebagian anggaran kali, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebagaimana anggaran.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:**

Nggak keseluruhan.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Pengalihan sebagian anggaran.

**KETUA RAPAT:**

Sebagian anggaran konkit nelayan.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Konkit nelayan ke petani, ke konkit petani. Pengalihan anggaran konkit nelayan ke konkit petani, *gitu* kira-kira Pak Ketua.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua saya tambah dikit ya, Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk tahun anggaran 2023 agar memperbanyak alokasi konkit petani dengan mengalihkan anggaran dari konkit nelayan kepada konkit petani. Iya mengalihkan sebagian besar *gitu*. Jadi tahun anggarannya itu sesudah ESDM RI untuk tahun anggaran 2023.

**KETUA RAPAT:**

Agar meningkatkan alokasi konkit petani itu dihapus di tahun 2023, hapus di tahun 2023.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Pak Ketua, Pak Dirjen karena memang realitasnya begitu syarat untuk konkit nelayan itu cukup berat *gitu*.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Kata besar itu perlu *nggak*, karena supaya.

**KETUA RAPAT:**

Ya saya kira mungkin sebagian aja ya Pak ya, bisa besar, kecil tapi kita *kan nggak* mengunci, sudah sebagian aja saya kira. Setuju ya Bapak, Ibu. Baik.

**(RAPAT:SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk memperluas cakupan wilayah program konversi BBM ke BBG bagi nelayan hingga kawasan Indonesia Timur yang juga mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Mungkin nggak usah menyebutkan provinsinya, nanti semua provinsi mau disebut kawasan Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur titik aja, Pak.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Apakah nyalain saja atau *nggak* usah tulis nelayan itu?

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Instruksi Pak Ketua, apa poin 4 itu perlu ya, *kan* tadi yang ketiga udah konsentrasi atau fokus ke daerah-daerah pemilihan, kalau ini lebih luas nanti akhirnya tidak perlu di *switch* lagi nanti anggaran nelayan ke petani karena *kan* banyak juga itu *kan*.

**KETUA RAPAT:**

Sebenarnya ini masukkan dari Pak Rico, waktu itu intinya di Papua tidak ada *gitu* Pak jadi mungkin spesifik ke sana saja kalau.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

*Kan* udah ada di poin 3 daerah-daerah pemilihan, kalau nanti seluruh Indonesia Timur ya yang 20.000 ini juga *nggak* cukup.

**KETUA RAPAT:**

Tapi Pak Rico Sia tadi apa memang ada ini ada aspirasi dari Papua dan Papua Barat agar memperluas cakupan wilayah untuk nelayan, Pak.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Khusus Papua aja, pengembangan nelayan di sana *gitu* aja lah disebut. Kalau seluruhnya ya *nggak* cukup lah 20.000, kita artinya itu kontroversi dengan yang poin 3 Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya memang Pak, tapi maksud saya kalau ini memang harus kita cantumkan karena ini *kan* berbeda dengan apa yang kita sampaikan nomor 3 *kan*, justru di nomor 3 itu kita ingin merubah dari nelayan ke petani. *Kan* ini ada keinginan untuk meningkatkan khusus konversi ke nelayan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Nelayan, logikanya gini Pak Ketua maaf ini. Berarti kalau yang poin 4 *kan* harus banyak untuk nelayan, 20.000 *nggak* cukup Pak, di daerah itu.

**KETUA RAPAT:**

*Nggak, nggak*, ini khusus alokasi sesuai dengan yang dialokasikan untuk Papua dan Papua Barat saja.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Ya langsung-langsung *gitu*.

**KETUA RAPAT:**

Oke kalau *gitu* bagi nelayan khususnya.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Izin Pimpinan mau tanya dulu. Pak, *ready nggak* 2023 untuk sampai selesai, setau saya belum *ready* kan.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Gini, kita 2023 itu baru menyelesaikan tangki timbun dulu.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Jadi belum *ready* sebenarnya kan. Jadi dia tidak *ready* Pak di tahun anggaran 2023 setahu saya untuk Kawasan Papua, Maluku itu belum *ready* untuk konversi *bener kan* Pak ya, *bener*. Jadi artinya kita bisa katakan untuk-tahun anggaran yang akan datang, dia 2023 itu belum *ready* Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat itu belum *ready* untuk konversi, Pak. Jadi boleh kita tambahkan mungkin kalau kita mau masukan untuk tahun anggaran yang akan datang, akan datang mungkin *next year*, infrastrukturnya belum *ready*, infrastrukturnya belum *ready*.

**KETUA RAPAT:**

Tapi tahun depan kira-kira sudah siap, Pak Prof?

**DIREKTUR JENDERAL MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Tahun depan mungkin, tahun ini tangki timbun selesai, tahun depan semestinya.

**KETUA RAPAT:**

Oke ya udah kalau *gitu* tambahkan aja, tambahkan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Tambahkan gini Pak Ketua, Komisi VII mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk mempertimbangkan perluasan cakupan wilayah program ini untuk tahun anggaran 2024 *gitu* aja.

**F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):**

Kalau saya pikir sebetulnya sebelumnya udah cukup, karena gini bahasa untuk *nggak* perlu dipertimbangkan lagi emang harus dikerjakan *nggak* perlu dipertimbangkan untuk memperluas cakupan ke sana dan tidak perlu disebutkan pada tahun anggaran berapa. Artinya bahwa, sekarang tahun ini sedang diupayakan untuk meluaskan kapasitas tadi dengan itu adalah langkah dalam rangka memperluas cakupan tadi *gitu*.

Adapun perwujudan konversinya baru tahun anggaran yang akan datang itu *kan* teknis berikutnya *gitu*, jadi *nggak* perlu sampai dengan detail disebutkan tahun anggarannya kalau menurut saya kalimat sebelumnya itu sudah-sudah cukup *gitu*.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Intrupsi Pak Ketua, ini maaf Bu Diah, ini bagusnya 2024 karena kalau ini *kan* awal tahun, ini keputusan politik untuk Dirjen Migas bagaimanapun dia harus berusaha untuk itu, jadi tidak mungkin di *switch* tadi poin 3 itu kalau tidak disebut 2024 berarti maksudnya ini tahun berjalan. Jadi ini *kan* sebabnya juga saya tambah mempertimbangkan ya karena belum, belum ada proses artinya siap untuk *converter* di sana *gitu*, beda dengan daerah-daerah lain jadi itu sebabnya.

Jadi kalau boleh ya tetap 2024, kalau mempertimbangkan di *delete* ya *nggak* apa-apa tapi memang sebaiknya pertimbangan artinya agar Dirjen Migas juga memulai merencanakan untuk itu 2024 itu maksudnya *gitu* itu.

**ANGGOTA KOMISI VII DPR RI RI:**

Pak interupsi Pak, itu khususnya Papua dan Papua Barat ini *kan* sangat spesifik. Bagaimana kalau ditambah misalnya semua dapil *gitu*.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Ini semua dapil iya, ini ada permintaan Pak Rico karena daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara itu belum siap untuk konversi. Jadi kita kasih *road*, kita kasih kesempatan lah untuk Kementerian ESDM membuat *roadmap*-nya.

**PEMBICARA:**

Sampai tahun 2024.

**F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):**

Ya, untuk kawasan itu, kawasan itu. *Nah* kalo yang konkrit yang Bapak punya itu ada di nomor 3, karena nomor 3 itu ada Pak konkrit nelayan, tetap ada. Di sini *kan* ada angkanya nih Pak, nanti di sini Bapak mengusulkan sesuai dengan prasyarat, memang daerah Jawa saya akui daerah Jawa itu sulit untuk memenuhi konversi BBM, karena *kan* harus dibawa 13 *hours power*, 13 HP.

Tadi Pak Ramson mengatakan betul Pak ramson mengatakan sulit di Jawa mendapatkan sesuai dengan persyaratan 13 *hours power*. Karena syaratnya di Sulawesi Selatan namanya mesin katinting, perahu di bawah 13 *hours power* yang bisa mendapatkan program konversi di atas 13 orang sesuai dengan Perpres. Betulkan Pak ya sesuai dengan Perpres harus di bawah 13 *hours power*.

*Nah* untuk daerah Jawa itu memang agak sulit seperti kata Pak Ramson untuk mendapatkan 13 *hours power*, beda dengan daerah luar Jawa, luar Jawa Kalimantan, Sulawesi, itu *kan* yang lainnya masih pakai mesin yang perahu-perahu yang katinting namanya itu, katinting juga namanya kalau di Kalimantan juga katinting yang di bawah 13 *hours power*, makanya kita sesuai bahwa untuk ini 2023 sesuai dengan keputusan nomor 3, nomor 4 ini.

Kenapa kami, saya sama Pak Ramson setuju dengan 2024, supaya tidak menjadi apa evaluasi nanti di 2023 kepada Kementerian ESDM kok belum ada nih konversi di daerah Indonesia Timur karena *kan* infrastrukturnya memang harus dibangun dulu, padahal tahun 2023 *kan* Bapak harus *roadmap* ke arah sana *gitu* loh, *gitu* kira-kira Pimpinan. Jadi saya setuju dikasih taro 2024 untuk kawasan Papua dan Papua Barat.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bu Andi.

Ini usul ini ya kalimatnya. Jadi saya kira ini mencakup semua usulan yang disampaikan ke rekan-rekan. Jadi bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Kementerian ESDM RI untuk segera mengkaji perluasan cakupan wilayah program konversi BBM ke BBG bagi nelayan khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya saya kira begitu ya, itu *kan* sangat luas dan tidak ada yang spesifik. Baik setuju.

**DIREKTUR JENDERAL MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Pak, jadi kalau saya memahami dari Pak Rico tadi bukan nelayan sebenarnya, tapi bisa juga Jargas. Jadi kalo diganti masyarakat gimana supaya

lebih umum Pak. Ya jadi dia semangatnya kalo saya liat bukan nelayan, tapi bisa konkrit bisa Jargas, jadi kalau kata nelayan diganti masyarakat aja gimana?

**KETUA RAPAT:**

Boleh, saya kira betul setuju, *oke*. Setuju masyarakat, jadi bisa mencakup semua pihak ya, nelayan diganti masyarakat ya tolong.

**DIREKTUR JENDERAL MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Ada nelayan, ada petani, di situ, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Iya setuju ya, baik setuju.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk segera melanjutkan penyelesaian pembangunan jaringan pipa transmisi Cirebon – Semarang.

Pak Dirjen setuju? Ya baik.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETUK PALU 1 KALI)**

Dan terakhir,

6. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk menjawab secara tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 21 Februari 2023.

Ibu-Bapak yang kami hormati,

Demikian Rapat Dengar Pendapat kami yang telah kami laksanakan bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, sebelum kami tutup kami persilakan Pak Dirjen untuk menyampaikan sambutan penutup.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Yang terhormat Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi VII yang hadir pada rapat RDP pada hari ini,

Kami ucapkan terima kasih atas segala masukannya dan apa yang disebutkan tadi kita akan lakukan sebaik-baiknya dan sekali lagi mohon tetap kita bisa berkomunikasi memberi masukan arahan kepada kami supaya apa yang diharapkan itu dapat tercapai.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dirjen Migas beserta seluruh jajarannya, kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi VII yang hadir baik fisik maupun virtual dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* dengan ini rapat dengar pendapat kami nyatakan ditutup.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

**a.n KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**DWIYANTI, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002**

